



## Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua

Endro Risdiyanto <sup>1)</sup> ; Julius Ary Mollet <sup>2)</sup> ; Halomoan Hutajulu <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

<sup>2,3)</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

Email: <sup>1)</sup> [endorisdiyanto@gmail.com](mailto:endorisdiyanto@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [julius.mollet@gmail.com](mailto:julius.mollet@gmail.com) ; <sup>3)</sup> [halomoan.h@gmail.com](mailto:halomoan.h@gmail.com)

### How to Cite :

Risdiyanto, E., Mollet, A.J., Hutajulu, H. (2023). Pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>

### ARTICLE HISTORY

Received [11 Mei 2023]

Revised [20 Juli 2023]

Accepted [30 Juli 2023]

### KEYWORDS

Fiscal, Poverty, Pooled Least Square, Fixed Effect Model, Random Effect Model, Poor People

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Studi ini menganalisis kemandirian fiskal dan belanja daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua melalui jalur pertumbuhan pro-poor melalui model data panel dengan 3 pilihan yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Dalam pendekatan ini pengolahan data dilakukan dengan menggabungkan data time series dan cross-section serta metode yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) atas data empiris 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan kapasitas kemandirian fiskal daerah dan belanja daerah berdampak kecil dalam menurunkan kemiskinan terutama di Kabupaten yang aksesnya demonya sulit dijangkau. Selama kurun waktu itu, Kemiskinan di Kabupaten/Kota di provinsi Papua menunjukkan tren yang cukup baik walaupun tidak signifikan, selain itu ada kecenderungan pola perubahan kemiskinan berlawanan arah dengan daerah perbelanjaan. Dimana kecenderungan peningkatan pada belanja daerah berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota di provinsi Papua selama kurun waktu tersebut.

### ABSTRACT

This study analyzes fiscal independence and regional spending in accelerating poverty alleviation in Papua Province through a pro-poor growth path through a panel data model with 3 options, namely Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM). In this approach, data processing is carried out by combining time series and cross-section data and the method used is Ordinary Least Square (OLS) on empirical data from 29 Regencies/Cities in Papua Province from 2010 to 2021. Increased regional fiscal independence capacity and regional spending has little impact on reducing poverty, especially in districts where access is difficult to reach. During that period, poverty in districts/cities in the province of Papua showed a good trend, although not significant. In addition, there was a tendency for the pattern of change in poverty to be in the opposite direction to shopping areas. Where the tendency of an increase in regional spending has an impact on reducing the percentage of poor people in districts/cities in the province of Papua during that period.

## PENDAHULUAN

Kemandirian fiskal daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri melalui sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan sumber daya alam (Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A,2018). Tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi dapat memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran mereka sesuai dengan prioritas lokal. Ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi tingkat kemiskinan (Widianto, A., Sedy, U., & Langgeng Nurmansyah, A,2016).

Belanja daerah di definisikan merujuk pada pengeluaran pemerintah daerah untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program sosial. Jika belanja daerah dialokasikan dengan bijak dan efektif, hal itu dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Jika belanja daerah diarahkan dengan baik, termasuk melalui program-program perlindungan sosial, ini dapat membantu mengurangi kemiskinan di Provinsi Papua.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana individu, keluarga, atau masyarakat tidak memiliki sumber daya yang cukup, baik secara materiil maupun non-materiil, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Hunuf, H., & Asmara, J. A,2017). Definisi kemiskinan cenderung melibatkan ketidakmampuan untuk memperoleh akses yang memadai terhadap makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan keamanan sosial (Paulus, D. I. S., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M,2019). Namun, penting untuk dicatat bahwa kemiskinan adalah isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik (Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N,2018). Selain kemandirian keuangan daerah dan belanja daerah, faktor-faktor seperti ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, akses terhadap layanan dasar, serta situasi konflik atau ketegangan politik juga dapat berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan (Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rimate, V. A,2019).

Permasalahan kemiskinan tersebut menjadi permasalahan pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan ekonomi daerah. Program penanggulangan kemiskinan selalu menjadi prioritas dalam program pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014, penanggulangan kemiskinan termasuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Papua. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018 yang memiliki misi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Berbagai program dicanangkan dalam pengentasan kemiskinan tersebut diantaranya terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan pekerja, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan keadilan gender dan perlindungan anak, serta berbagai program pembangunan lainnya yang mendukung misi tersebut. Selanjutnya dalam RPJMD 2018-2023, penanggulangan kemiskinan kembali menjadi salah satu tujuan pembangunan di Papua. Program penanggulangan kemiskinan selalu menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah setiap tahunnya (Gaghana, R. L., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2018).

Pembangunan daerah tersebut dapat terwujud dengan adanya pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan dan belanja daerah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anjani, E. S. D., Akram, & Handajani, L,2015). Hal tersebutlah yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan keuangan atau desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal tersebut direspon pemerintah daerah dengan cara (1) memusatkan perhatian pada upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan (2) lebih berorientasi pada efektivitas pengeluaran belanja daerah (Makrifah 2010). Upaya peningkatan pendapatan daerah dapat ditempuh dengan cara menggali sumber daya ekonomi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan menciptakan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian tersebut ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio dana perimbangan terhadap

total pendapatan. Rasio PAD yang semakin besar menunjukkan kemandirian keuangan daerah semakin baik. Sebaliknya, rasio dana perimbangan yang semakin besar menunjukkan semakin rendah kemandirian keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah (Tolosang, K. D,2018).

Ekonomi Papua pada triwulan I-2023 dibandingkan dengan triwulan I-2022 mengalami kontraksi sedalam -2,39 persen (y-on-y), namun jika dilihat tanpa pertambahan dan penggalian ekonomi Papua mengalami pertumbuhan 4,67 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi Papua masih didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sedalam -11,64 persen disebabkan karena menurunnya produksi emas dan tembaga dikarenakan proses produksi yang terhambat yang disebabkan oleh curah hujan dan tanah longsor.

Selain Sektor Pertambangan dan Penggalian, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan sedalam -0,29 persen yang disebabkan produksi Industri kayu dan beberapa industri lainnya mengalami penurunan. Tiga sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2023 yaitu Sektor Transportasi Pergudangan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.

Pertumbuhan ekonomi Papua triwulan I-2023 (y-on-y) yang mengalami kontraksi -2,39 persen merupakan andil dari seluruh lapangan usaha, terutama lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Papua yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang memberikan kontribusi sebesar 36,24 persen; Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 14,72 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 10,70 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 9,61 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi sebesar 8,34 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua triwulan I-2023 (y-on-y), Papua didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian yang memberikan sumber kontraksi terdalam sebesar -5,04 persen dan disusul dengan lapangan usaha Konstruksi yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,47 persen; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,47 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,42 persen; dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,40 persen; selain 5 lapangan usaha di atas memiliki sumber pertumbuhan 0,89 persen.

Ekonomi Papua Tanpa Pertambangan dan Penggalian triwulan I-2023 dibandingkan triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,67 persen. Kategori lapangan usaha Konstruksi memberikan kontribusi tertinggi sebesar 23,08 persen dengan laju pertumbuhan 3,92 persen. Kategori lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,01 persen yang disebabkan karena meningkatnya jumlah penumpang berangkat dan barang muat terutama pada subsektor angkutan laut dan angkutan udara. Pertumbuhan ini disebabkan karena pada tahun lalu masih adanya pembatasan aktivitas yang disebabkan karena Covid-19.

Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,393. Angka ini menurun sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,397. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,294 turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,315 dan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,307. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,419, turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,427 dan sama dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,419. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada September 2022 distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,78 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,89 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

## LANDASAN TEORI

Todaro dan Smith (2006) mendefinisikan pembangunan sebagai proses multidimensi yang meliputi perubahan pada sikap masyarakat, struktur sosial, dan institusi nasional, di samping tetap fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan kondisi ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Tiga tujuan inti pembangunan yaitu (1) peningkatan ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, keamanan, dan kesehatan; (2) peningkatan kualitas kehidupan yang sekaligus menciptakan rasa memiliki harga diri dalam setiap pribadi individu; (3) perluasan akses pada berbagai pilihan ekonomis maupun pilihan sosial untuk setiap individu, dan bebas dari ketergantungan pada pihak lain (Aulia, N,2014).

Termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah yaitu pemberian hak, kewenangan, dan kewajiban pada daerah dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakat daerah sesuai perundangan yang berlaku. Pemberlakuan otonomi daerah juga diiringi adanya desentralisasi pengelolaan keuangan atau desentralisasi fiskal. Tujuan desentralisasi fiskal tersebut yaitu mengurangi kesenjangan fiskal antar tingkat pemerintahan maupun antar pemerintah daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal juga dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta pengurangan kesenjangan atas ketersediaan dan distribusi pelayanan publik antar daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola keuangan daerah sehingga perumusan dan pelaksanaan APBD diserahkan pada pemerintah daerah. Namun demikian pemerintah harus akuntabel dalam menjalankan tata kelola keuangannya (Kurniasih 2011).

Dana perimbangan adalah bagian dana APBN yang dialokasikan kepada daerah atau diberikannya anggaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemberian dana perimbangan dimaksudkan agar kesenjangan fiskal antar daerah dan tingkat pemerintahan dapat berkurang. Penentuan besaran dana alokasi umum tersebut dihitung berdasarkan celah fiskal yang diperoleh dari kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal.

Tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal salah satunya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan dan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki hubungan arah negatif atau makna berkebalikan. Nilai rasio PAD yang semakin tinggi menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik. Adapun nilai rasio dana perimbangan yang semakin tinggi menunjukkan kemandirian keuangan yang semakin rendah. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dapat mengukur kemampuan keuangan daerah. Rumus rasio PAD dan rasio dana perimbangan sebagai berikut.

$$\text{asio PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio dana perimbangan} = \frac{\text{Dana perimbangan}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

**Table 1. Kemampuan Keuangan Daerah dilihat Berdasarkan Rasio PAD**

| Interval      | Kemampuan Keuangan Daerah |
|---------------|---------------------------|
| 00.00 – 10.00 | Sangat Kurang             |
| 10.01 – 20.00 | Kurang                    |
| 20.01 – 30.00 | Cukup                     |
| 30.01 – 40.00 | Sedang                    |
| 40.01– 50.00  | Baik                      |
| >50.00        | Sangat baik               |

Source: Depdagri dan Fisipol UGM (1991) dalam Suci (2013)

Selain itu, hubungan antara kemandirian keuangan daerah dengan indikator pembangunan juga perlu diperhatikan, yakni salah satunya hubungannya dengan kemiskinan di daerah. Penelitian Isramiwarti et al. (2017) menyebutkan bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan kemandirian daerah dan meningkatkan alokasi belanja daerah terutama terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Peningkatan PAD pada akhirnya memiliki dampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan PAD memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Peningkatan PAD menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian daerah dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel dengan cross section 28 kabupaten/kota di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Merauke, mappi, boven digoel, Intan Jaya, Lanni Jaya, paniai, dogiyai, asmat, Mamberamo raya, mamberamo tengah, yalimo, nduga, puncak, puncak Jaya, pegunungan bintang, Tolikara, yahukimo) dan data time series waktu tahunan periode 2010 sampai dengan 2021. Variabel yang digunakan adalah persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, rasio PAD, rasio dana perimbangan, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur.

Dalam penelitian ini menggunakan data Sekunder dari Instansi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Data tersebut digunakan untuk melihat gambaran persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, rasio PAD, rasio dana perimbangan, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja Infrastruktur Provinsi Papua. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan pustaka melalui teks tertulis maupun dokumentasi.

Menurut Ekananda (2015) dalam ekonometrika proses penyatuan data time series dan data cross section disebut dengan pooling, sedangkan data yang dihasilkan disebut pooled data atau panel data. Keuntungan penggunaan data panel yaitu jumlah observasi yang semakin banyak semakin baik untuk memperoleh hasil estimasi parameter. Hal tersebut akan memperbesar derajat kebebasan (degree of freedom) dan menurunkan kolinearitas antar variable independen. Keuntungan lainnya yaitu penggunaan data panel dapat mengestimasi masing-masing karakteristik individu maupun karakteristik menurut waktu secara terpisah. Dalam analisis data panel terdapat tiga pilihan model estimasi yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

**Table 2. Selang Nilai Statistik Durbin-Watson serta Keputusannya**

| Nilai DW               | Keputusan                     |
|------------------------|-------------------------------|
| $4 - DI < DW < 4$      | Terdapat Autokorelasi Negatif |
| $4 - Du < DW < 4 - DI$ | Hasil Tidak Dapat Ditentukan  |
| $Du < DW < 4 - Du$     | Tidak Terdapat Autokorelasi   |
| $DI < DW < Du$         | Hasil Tidak Dapat Ditentukan  |
| $0 < DW < DI$          | Terdapat Autokorelasi Positif |

Source: Juanda, 2009

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Kemiskinan Makro

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

**Table 3. Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat Kemiskinan, Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia dan Papua, 2017-2021**

| Indikator Kemiskinan                  |           | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Garis Kemiskinan (Rp/Perkapita/Bulan) | Papua     | 457,541    | 499,463    | 540,099    | 562,992    | 591,959    |
|                                       | Indonesia | 385,953    | 408,962    | 438,448    | 456,690    | 967,204    |
| Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)         | Papua     | 897,690    | 917,630    | 926,360    | 911,370    | 920,440    |
|                                       | Indonesia | 26,582,990 | 25,674,580 | 24,785,870 | 27,549,690 | 26,503,650 |
| Tingkat Kemiskinan (%)                | Papua     | 27.62      | 27.74      | 27.53      | 26.64      | 26.86      |
|                                       | Indonesia | 10.12      | 9.66       | 9.22       | 10.19      | 9.71       |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)       | Papua     | 7.50       | 6.73       | 7.17       | 6.16       | 5.60       |
|                                       | Indonesia | 1.79       | 1.63       | 1.5        | 1.75       | 1.67       |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (%)       | Papua     | 2.82       | 2.28       | 2.60       | 2.08       | 1.69       |
|                                       | Indonesia | 0.46       | 0.41       | 0.36       | 0.47       | 0.41       |

Source: BPS Indonesia dan Papua, 2022

Tingkat kemiskinan Papua tahun 2017 sebesar 27,62 persen, hingga tahun 2021 mencapai 26,86 persen dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 27,28 persen terjadi penurunan sebesar 0,76 point. Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017 sebesar 10,12 persen hingga tahun 2021 berada di angka 9,71 persen, dengan rata-rata selama kurun waktu tersebut sebesar 9,78 persen terjadi penurunan sebesar 0,41 point. Indeks kedalaman kemiskinan Papua tercatat sebesar 7,50 persen tahun 2017, di tahun 2021 sebesar 5,60 persen, rata-rata dalam lima tahun sebesar 6,63 persen. Indeks kedalaman kemiskinan Indonesia lebih kecil dibanding Papua. Tahun 2017 kedalaman kemiskinan Indonesia sebesar 1,79 persen hingga tahun 2021 mencapai 1,67 persen dengan rata-rata sebesar 1,67 persen. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks ini, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Indeks keparahan kemiskinan Papua di tahun 2017 sebesar 2,82 persen hingga tahun 2021 mencapai 1,69 persen dengan rata-rata dalam kurun waktu tersebut sebesar 2,29 persen. Indonesia di tahun 2017 memiliki nilai indeks sebesar 0,46 persen dan pada tahun 2021 sebesar 0,41 persen dengan rata-rata indeks dalam kurun waktu tersebut sebesar 0,42 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa indeks keparahan di Papua lebih tinggi dibanding Indonesia. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Sampai dengan tahun 2021 tingkat kemiskinan paling tinggi di Indonesia adalah Provinsi Papua sebesar 26,86 persen sedangkan secara Nasional sebesar 9,71 persen. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara Provinsi Papua dan Indonesia yaitu sebesar 17,15 point. Kabupaten yang tingkat kemiskinannya yang paling tinggi adalah di Kabupaten Intan Jaya sebesar 41,66 persen dengan rata-rata tingkat kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 42,05 persen. Tingkat kemiskinan paling rendah terdapat di Kabupaten Merauke sebesar 10,16 persen dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 10,38 persen.

Perkembangan sejumlah indikator kemiskinan di Provinsi Papua dan Indonesia dalam lima tahun terakhir. Garis kemiskinan Papua tahun 2017 sebesar Rp. 457 ribu lebih tinggi dibanding Indonesia sebesar Rp. 385 ribu. Hingga tahun 2021 garis kemiskinan Papua sebesar Rp. 591 ribu sedangkan Indonesia mencapai Rp. 967 ribu perkapita perbulan. Kurun waktu tersebut garis kemiskinan Papua mengalami peningkatan sebesar Rp. 134 ribu sedangkan Indonesia peningkatannya cukup besar yakni Rp. 581 ribu. Jumlah penduduk miskin di Papua tahun 2017 sebanyak 897 ribu jiwa, sedangkan di Indonesia 26,58 juta jiwa. Hingga tahun 2021 penduduk miskin Papua mencapai 920 ribu jiwa ada peningkatan sebanyak 22 ribu jiwa, penduduk miskin Indonesia tahun 2021 tercatat 26,53 juta jiwa atau ada penurunan sebesar 79 ribu jiwa.

### **Kondisi Kemiskinan Mikro**

Kemiskinan mikro didasarkan pada 14 kriteria kemiskinan dengan berbasis pada rumah tangga. Ke-14 variabel yang digunakan adalah luas lantai per kapita jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, membeli daging/ayam/susu, frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha kepala rumah tangga, Pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki rumah tangga.

Pengeluaran perkapita dikalangan penduduk miskin sangat dibutuhkan pemerintah dalam rangka menentukan kebijakan atau intervensi pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2021, terlihat bahwa persentase pengeluaran perkapita tertinggi penduduk miskin untuk makanan terdapat di Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 74,33 persen, pengeluaran perkapita tertinggi penduduk tidak miskin berada di Tolikara sebesar 72,21 persen, sedangkan pengeluaran penduduk miskin dan tidak miskin tertinggi di Mamberamo Tengah sebesar 72,80 persen.

Persentase tertinggi rumah tangga miskin yang menggunakan air layak di Papua Tahun 2021 terdapat di Kabupaten Asmat sebesar 99,52 persen, selanjutnya Kota Jayapura 97,26 persen, dan Biak Numfor 92,60 persen di posisi ketiga. Sedangkan persentase terendah rumah tangga miskin yang menggunakan air layak terdapat di Kabupaten Nduga sebesar 12,05 persen, selanjutnya Tolikara sebesar 6,05 persen dan Lanny Jaya sebesar 2,68 persen.

### **Kondisi Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Papua**

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya dalam menentukan target penerimaan daerah untuk menaikkan belanja daerah. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya.

Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, maka dialokasikan untuk mendanai belanja tidak langsung dan belanja

program pembangunan daerah yang dikelompokkan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 4. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Rp. Triliun)**

| No          | URAIAN   | PROYEKSI |          |          |          |                 |
|-------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|
|             |  | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023            |
| A           | Kapasitas Riil   | 7.255,26 | 7.255,35 | 7.998,05 | 8.397,95 | <b>8.817,85</b> |
| B           | Penggunaan Kapasitas Riil  | 7.255,26 | 7.255,35 | 7.998,05 | 8.397,95 | <b>8.817,85</b> |
| <b>B.1.</b> | <b>Prioritas I</b>   |          |          |          |          |                 |
|             | Belanja Langsung Program Prioritas untuk pencapaian visi dan misi Daerah Tahun 2018-2023 | 6.647,26 | 6.586,55 | 7.262,37 | 7.588,70 | <b>7.927,67</b> |
| <b>B.2.</b> | <b>Prioritas II</b>  |          |          |          |          |                 |
| 02.01       | Belanja Langsung Program Rutin pada seluruh Perangkat Daerah                             | 608,00   | 668,80   | 735,68   | 809,25   | <b>890,17</b>   |

Sumber: RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

#### Belanja Daerah Provinsi Papua

Pada belanja modal semakin turun dari tahun ke tahun, karena prioritas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana makin berkurang pada periode berikutnya. Selain itu, penurunan belanja modal juga terindikasi dengan adanya perubahan kewenangan pada beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan terhadap beberapa urusan tertentu.

**Tabel 5. Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (Rp. Miliar)**

| Uraian                               | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pendapatan Daerah                    | 13.006.813 | 13.489.981 | 15.239.937 | 13.030.852 | 13.885.923 |
| PAD                                  | 1.020.372  | 1.050.372  | 2.027.638  | 1.388.510  | 2.139.689  |
| Pendapatan Transfer                  | 11.985.703 | 12.435.095 | 13.197.082 | 11.637.579 | 11.735.255 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 737        | 4.514      | 15.216     | 4.763      | 10.979     |
| Belanja Daerah                       | 13.303.282 | 13.186.887 | 13.421.675 | 12.606.998 | 14.859.606 |
| Belanja Operasi                      | 5.593.693  | 6.271.789  | 8.051.088  | 8.503.101  | 10.758.814 |
| Belanja Modal                        | 2.328.013  | 1.918.505  | 2.236.551  | 839.209    | 1.116.374  |
| Belanja Tidak Terduga                | -          | 4.000      | 15.001     | 188.612    | 119.121    |
| Belanja Transfer                     | 5.381.577  | 4.992.592  | 3.119.035  | 3.076.075  | 2.865.299  |

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan komponen pembentuk pendapatan dan belanja daerah mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat. Pendapatan daerah dari Rp. 13 triliun tahun 2017 menjadi Rp. 13,89 triliun di tahun 2021. Begitupun dengan belanja daerah mulai dari Rp.13,03 triliun menjadi Rp.14,86 triliun tahun 2021.

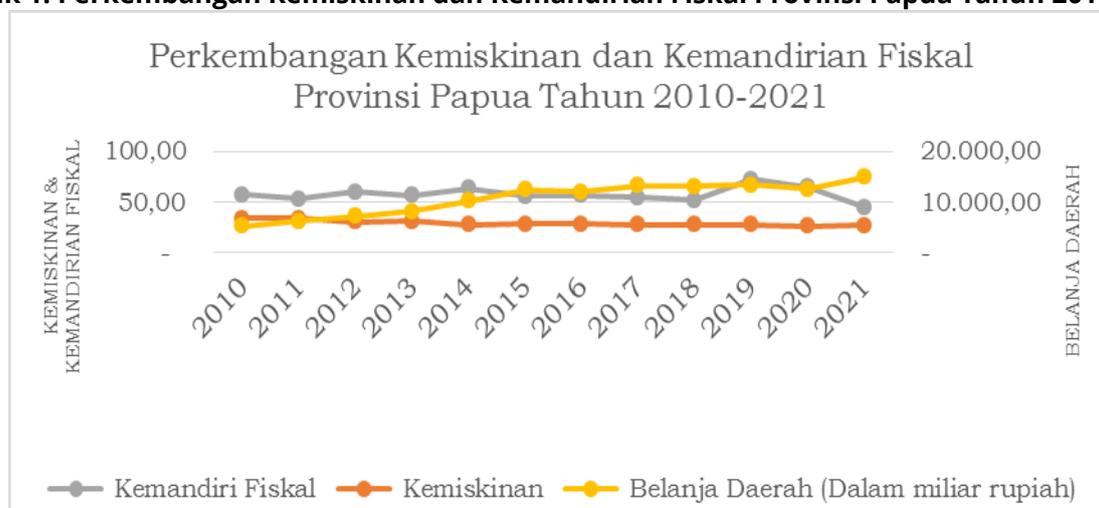
Perkembangan Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Provinsi Papua 2010-2021

**Tabel 6. Perkembangan Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Provinsi Papua Tahun 2010-2021**

| Tahun | Kemiskinan | Kemandirian Fiskal | Belanja Daerah (Dalam miliar rupiah) |
|-------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| 2010  | 34,10      | 23,59              | 5.284,53                             |
| 2011  | 34,11      | 19,18              | 6.290,38                             |
| 2012  | 30,66      | 29,42              | 7.239,67                             |
| 2013  | 31,52      | 25,24              | 8.171,35                             |
| 2014  | 27,80      | 35,74              | 10.303,79                            |
| 2015  | 28,17      | 28,04              | 12.396,45                            |
| 2016  | 28,54      | 28,36              | 11.968,49                            |
| 2017  | 27,62      | 26,99              | 13.303,28                            |
| 2018  | 27,74      | 23,80              | 13.186,89                            |
| 2019  | 27,53      | 44,84              | 13.421,68                            |
| 2020  | 26,64      | 38,17              | 12.607,00                            |
| 2021  | 26,86      | 18,23              | 14.859,61                            |

Sumber data: Data diolah, 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 penduduk miskin di Provinsi Papua tercatat sebesar 34,10 dan mengalami penurunan menjadi 26,86 di tahun 2021. Selain itu, tingkat kemandirian fiskal Provinsi Papua pada tahun 2010 tercatat sebesar 23,59 persen dan cenderung fluktuatif hingga tahun 2021 tercatat sebesar 18,23 persen. Sementara itu, Belanja Daerah Provinsi Papua pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 5.284,53 dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 14.859,61.

**Grafik 1. Perkembangan Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Provinsi Papua Tahun 2010-2021**

Sumber data: Data diolah, 2023

Selama kurun waktu 2010-2021, Kemiskinan di Provinsi Papua menunjukkan trend yang cukup baik, selain itu ada kecenderungan pola perubahan kemiskinan berlawanan arah dengan belanja daerah. Dimana kecenderungan peningkatan pada belanja daerah berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua selama kurun waktu tersebut. Selain itu kemandirian keuangan daerah menunjukkan trend yang fluktuatif walaupun dbelanja daerah cenderung mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal. Kemiskinan di Provinsi dari tahun 2010 sampai 2021 menunjukkan tren yang menurun tetapi tidak secara signifikan. Di Provinsi Papua masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Dari Kabupaten/Kota di Provinsi Papua di atas, akan tetapi beberapa kabupaten/kota Kabupaten Deiyai memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi.

Ada kecenderungan pola perubahan kemiskinan berlawanan arah dengan belanja daerah. Dimana kecenderungan peningkatan pada belanja daerah berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin. Kemandirian Fiskal daerah Kabupaten/Kota menunjukkan trend yang fluktuatif walaupun belanja daerah cenderung mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu tersebut.

### Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu seharusnya terus meningkatkan upaya dalam menggali potensi daerah dengan meningkatkan sumber-sumber yang menghasilkan fiscal daerah dan menciptakan kemandirian keuangan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah menciptakan iklim investasi yang baik sehingga badan usaha di daerah yakni BUMD, BUMDes, dan lain-lain dapat meningkatkan sumbangannya terhadap PAD. Selain itu, alokasi belanja berdasarkan fungsi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah sehingga dapat meningkatkan suatu sektor yang memerlukan tambahan dana yang lebih besar dalam suatu tahun anggaran. Oleh karena itu diperlukan perencanaan APBD yang efektif dan matang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Papua. 2022. Publikasi Data dan Informasi Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2022. Jayapura (ID): BPS Papua.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2023. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010-2021. Jakarta (ID): DJPK.
- Ekananda M. 2015. Ekonometrika Dasar untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Bisnis. Jakarta (ID): Mitra Wacana Media.
- Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua. 2023
- Isramiwarti R, Rasuli M, Taufik T. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Pekbis Jurnal*. 9(3).
- Kurniasih Y. 2011. Strategi Meningkatkan Kapasitas Fiskal (Pajak Daerah) di Pemerintah Daerah Kota Bogor (Studi Kasus Dispenda Kota Bogor) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Makrifah SA. 2010. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Suci SC. 2013. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Banten [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Todaro MP, Smith SC. 2006. Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan). Erlangga: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): RI.